



# WACANA PENEKAKAN HUKUM

Laporan Riset Dr Jan Hoesada,  
Komite KSAP

## PENDAHULUAN

Kabinet Prabowo mengumumkan agenda penegakan hukum, makalah ini mendukung program tersebut.

Muhammad Ali, 2024, menyajikan artikel berjudul *Janji dan Strategi Prabowo Memberantas Korupsi yang Sudah Menggila*, sumber Liputan6.com, Jakarta, antara lain mengungkapkan bahwa dalam pidato perdananya, Prabowo menyinggung soal kebocoran uang negara. Menurutnya, penyelewengan anggaran tersebut sangat membahayakan masa depan Indonesia. "Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, **dengan penegakan hukum yang tegas**, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan," kata Prabowo dalam pidato perdananya usai pelantikan Presiden di Gedung DPR-MPR, Minggu 20 Oktober 2024.

Untuk memberantas kejahatan *ekstraordinary* itu, Prabowo menginstruksikan semua unsur harus ikut serius terlibat, terlebih kepada **pimpinan pimpinan instansi untuk memberi teladan yang baik terhadap pemberantasan korupsi. Pimpinan harus memberi contoh, ing ngarso sung tulodo. Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dari semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras,**" kata dia. Prabowo juga menyinggung soal kebocoran uang negara. Menurutnya, penyelewengan anggaran tersebut sangat membahayakan masa depan Indonesia.

"Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. **Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita,**" ucap Prabowo. "Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan takut melihat realita ini," dia menambahkan. Prabowo mengaku prihatin dengan kondisi saat ini. Meski Indonesia sudah merdeka, namun rakyatnya masih banyak yang belum menikmati hasil kemerdekaan tersebut.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan.

Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," ujar dia.

## WACANA 2015

Kementerian Sekretariat Negara

Republik Indonesia, 2015, menyajikan artikel berjudul *Penataan Ulang Mekanisme Pengawasan Penegakan Hukum*, sumber Humas Kemensetneg, antara lain mengungkapkan bahwa *Focus group discussion* yang dimoderatori oleh Deputy Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Dadan Wildan, menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, yaitu Saldi Isra dari Universitas Andalas, Padang, Zainal Arifin Muchtar dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara. Hadir pula pejabat di lingkungan Lembaga Kepresidenan dan Pejabat Kementerian/Lembaga lain.

### Penegakan Hukum

Adanya kekhawatiran Aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah, hal ini melatarbelakangi meningkatnya intensitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sehingga membuat para Aparatur Pemerintah Resah. Dalam pemberantasan tindakan korupsi terkait



dengan meningkatnya intensitas pemeriksaan oleh aparat penegak hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah yang berimplikasi pada rendahnya penyerapan APBN dan APBD.

Saldi menambahkan adanya pihak-pihak yang dirugikan dengan agenda pemberantasan korupsi. Pertama, perlu ditelusuri secara mendalam apakah ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Daerah agar agenda pemberantasan korupsi tidak berjalan mulus. Hal kedua, bisa jadi topik ini berkaitan dengan dalih aparat penegak hukum untuk menjadikan dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai ATM.

Berbeda dengan Saldi, Zainal Arifin mengungkapkan terkait dengan penegakan hukum, sistem penegakan hukum harus dipikirkan karena ada gejala antar penegak hukum melakukan apa yang dipikirkan sendiri.

Refly Harun menegaskan pendekatan pada substansi hukum tidak cukup untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan wewenang, sehingga harus menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan institusi dan aparatur. Penegakan hukum oleh KPK nyatanya lebih dipercaya oleh publik terkait pemberantasan korupsi, daripada kepolisian dan jaksa.

### Penyerapan Anggaran

Selain penegakan hukum, isu penyerapan daerah yang rendah juga menjadi hal yang menarik dalam *focus group discussion* ini.

Zainal Arifin menilai isu penyerapan anggaran daerah yang rendah berbahaya dan berkaitan dengan transfer ke daerah yang terlambat. Penyerapan anggaran daerah bukan karena personal problem, tetapi juga terkait konstelasi sistem keuangan.

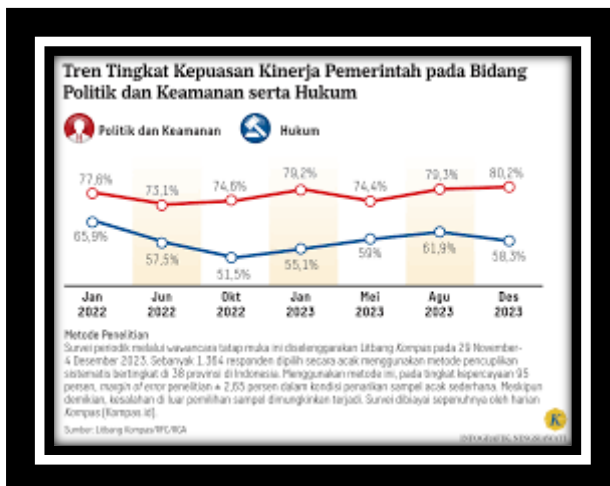
Saldi menilai bahwa harus ada *setting* baru dan fleksibilitas terkait laporan keuangan daerah. Karena dengan sistem seperti saat ini memunculkan rekayasa-rekayasa oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menggunakan strategi *injury time*. Menghabiskan anggaran daerah di akhir-akhir tahun

BPKP selaku pengawas internal pemerintah memiliki *tool* untuk audit yang sifatnya *real time*, sebagai contoh setelah kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan maka BPKP akan melakukan audit. BPKP sedang mempersiapkan *tool* agar APIP lebih berdaya di Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, ujar Sumarjo, perwakilan dari BPKP.

Moderator menyimpulkan perlu adanya penataan ulang mekanisme pengawasan sehingga tidak menyebabkan implikasi pada rendahnya penyerapan anggaran yang menyebabkan ketakutan penyelenggara pemerintah dan pencarian kesalahan oleh pihak Aparat Penegak Hukum.

## STRATEGI POLRI UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI APBN

M. Agus Yozami, 2025, menyajikan artikel berjudul *Ini Strategi Polri, Kejagung dan KPK Atasi Kebijakan Efisiensi Anggaran*, antara lain mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan seluruh mitra kerja terkait dalam rangka meminta penjelasan terkait efisiensi anggaran oleh kementerian/lembaga tahun anggaran 2025., sebagaimana **Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025**. Tiga di antara mitra kerja Komisi III adalah Polri, Kejaksaan dan KPK.



Dalam rapat kerja tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun. Di awal, pagu anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp126,6 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai Rp59,44 triliun (46,9 persen), belanja barang sebesar Rp34,077 triliun (26,91 persen), dan belanja modal sebesar Rp33,09 triliun (26,14 persen).

Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri tahun 2025, tidak mencakup belanja pegawai, melainkan terdiri dari belanja barang sebesar Rp6,6 triliun (19,62 persen dari pagu awal) dan belanja modal Rp13,9 triliun (42 persen dari pagu awal). Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun, yaitu untuk belanja pegawai sebesar Rp59,4 triliun, belanja barang Rp27,3 triliun, dan belanja modal Rp19,1 triliun.

## STRATEGI KPK UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI APBN

Makalah 2025 berjudul *Dukung Program Prioritas Nasional, KPK Rekonstruksi Anggaran Tahun 2025*, antara lain mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

memaparkan langkah rekonstruksi anggaran tahun 2025 kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Gedung Nusantara, Jakarta pada Rabu (12/2). Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa rekonstruksi anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan KPK kepada pemerintah. Pagu KPK tahun 2025 sebelum rekonstruksi adalah Rp1,237 triliun, lalu kemudian setelah rekonstruksi menjadi Rp1,036 triliun, sehingga efisiensi dari KPK mencapai Rp201 miliar. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, KPK menyesuaikan anggarannya untuk mendukung kebijakan tersebut. Mata anggaran pada pos belanja barang disesuaikan menjadi Rp239 miliar dari sebelumnya Rp428 miliar atau mencapai 45%. Pada pos belanja modal, dilakukan efisiensi sebesar 37%, sehingga menjadi Rp11,82 miliar yang sebelumnya adalah Rp18,72 miliar. Langkah rekonstruksi anggaran lainnya dilakukan KPK dengan penyesuaian pada sejumlah aspek, di antaranya terkait perjalanan dinas, optimalisasi teknologi informasi untuk kegiatan rapat dan seminar, pembatasan kegiatan seremonial, pengadaan *souvenir*, serta efisiensi penggunaan jasa konsultan/ahli. Dalam konteks biaya pemeliharaan, belanja barang dan jasa, KPK juga sudah cukup efisien, karena tidak ada fasilitas rumah dan kendaraan dinas bagi pejabat dan pegawai.



Pedang keadilan bisa ikut serta mensejahterakan rakyat, dengan cara apa? Tentu dengan penegakan hukum. Bagaimana penerimaan negara bisa masuk dari pemulihan aset di bidang pemberantasan korupsi, minimal dengan menekan potensi kebocoran di sejumlah sektor.

Pada situs KPK , diunggah peta-jalan KPK sampai 2045 sbb :

- Pemberantasan korupsi yang berorientasi pada penguatan sistem anti korupsi adalah proses panjang lintas periode kepemimpinan KPK.
- Ibarat perlombaan atletik, penguatan sistem anti korupsi adalah lari estafet, dimana keberhasilannya secara keseluruhan ditentukan oleh kerjasama antar tahapan.
- Oleh karenanya, sekalipun dalam setiap periode kepemimpinan mempunyai prioritas tersendiri, garis besar haluan lintas periode atau peta jalan tetap diperlukan untuk memastikan pembangunan sistem tetap berlanjut secara kumulatif.
- Tahun 2045 menjadi titik strategis peta jalan pemberantasan korupsi bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka.
- Selain itu pemerintah mempunyai visi Indonesia 2045 yaitu negara dengan PDB terbesar ke-5 di dunia (PDB \$ 7 triliun dan pendapatan per kapita \$ 23.199 dan mengurangi kemiskinan hingga mendekati nol)—yang menjadikan pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien sebagai salah satu prasyaratnya.

## PEMBANGUNAN GCG

Kominfo, 2015, menyajikan artikel berjudul *Praktik GCG dan Etika Bisnis Untuk Menangkan Persaingan*, sumber Berita Komdigi•Sivitas, antara lain mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi senjata ampuh untuk dapat memenangkan persaingan. GCG diperlukan untuk menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat sehingga mampu menjadi perusahaan kelas dunia, dalam saat yang sama etika bisnis perlu dijalankan sesuai alur bisnis. Dalam pidato bertema Etika Bisnis dan *Good Corporate Governance*. Para pengusaha tidak mempunyai etika bisnis namun tidak semua, tapi ada pengusaha-pengusaha yang ingin cepat mendapatkan hasil contohnya membuka lahan dengan membakar ini pemikirannya hanya dengan biaya yang semurah-murahnya dapat hasil yang sebesar-besarnya, hingga menghilangkan etika bisnisnya. Etika bisnis tidak hanya di kalangan korporasi namun di kalangan penyelenggara pemerintahan juga. Menteri mencontohkan bahwa di dunia ini, Indonesia satu satunya negara yang jumlah menteri, gubernur, bupati, dan walikotanya banyak terjerat kasus hukum. *World Governance Index* di Indonesia pada 2013 berada di urutan nomor 114 dari daftar negara. Dari *World Bank* dengan skala penilaian *governance*-nya 100 yang nilainya bagus, Indonesia masih pada skala 37.

Pada tataran pemerintahan kita kenal pembentukan Zona Bebas Korupsi. Artikel tahun 2021 berjudul *Pemerintah Tekankan Penerapan GCG di Perusahaan Demi Tarik Investasi*, sumber Liputan6.com, Jakarta, (Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris), 2021, antara lain mengungkapkan bahwa kedatangan pandemi Covid-19 secara tiba-tiba pada semester pertama 2020 telah menimbulkan disrupsi dan menggeser berbagai tatanan kehidupan yang dikenal sebelumnya. Di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/5/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia relatif masih terkendali. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris). Kedatangan pandemi Covid-19 secara tiba-tiba pada semester pertama 2020 telah menimbulkan disrupsi dan menggeser berbagai tatanan kehidupan yang dikenal sebelumnya. Pandemi mengingatkan kembali pentingnya keberlangsungan bisnis, bahwa perusahaan harus memperhatikan semua stakeholders internal dan eksternal yang terdampak, dari para pemegang saham, pegawai, hingga konsumen akhir.

“Kita juga melihat pentingnya kecepatan perusahaan merespon terjadinya hal-hal yang sebelumnya tak terduga. Semuanya menekankan kembali kebutuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) sebagai fondasi utama pengambilan keputusan yang lebih baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Indonesian Institute for Corporate Directorship Corporate Governance (IICD CG) Conference bertema *The 10th ACGS Implementation: Road to ESG in Indonesia*, secara virtual di Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Sebagai studi kasus, Artikel 2023 berjudul *Penerapan GCG Petrokimia Gresik Terus Meningkat Selama Empat Tahun Terakhir*, sumber Komunikasi Korporat PG, antara lain mengungkapkan bahwa perusahaan Solusi Agroindustri anggota *holding* Pupuk Indonesia berhasil meningkatkan kualitas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tahun buku 2022 di perusahaan, dengan raihan skor *assessment* 97,35 atau kualifikasi "Sangat Baik". Direktur Utama Petrokimia Gresik, menyampaikan bahwa atas capaian tersebut, skor penerapan GCG di Petrokimia Gresik terus meningkat selama empat tahun terakhir. "Salah satu semangat dari implementasi GCG di Petrokimia Gresik adalah melindungi konsumen, dalam hal ini petani, melalui produk berkualitas dan layanan *excellent* sehingga mendorong keberlanjutan perusahaan. Nilai positif lainnya yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional



dan terwujudnya kemajuan pertanian di Indonesia," tandas Dwi Satriyo. Terdapat enam aspek penilaian dalam *assessment* GCG, yaitu komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan; aspek pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Dewan Komisaris; Direksi; Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta aspek lainnya. Dan tingkat pemenuhan Petrokimia Gresik terhadap aspek-aspek tersebut di atas 85 persen. Sebagai informasi, penerapan GCG di Petrokimia Gresik telah dimulai sejak tahun 2004. Dimana setiap tahun dilakukan *assessment*, baik oleh eksternal maupun internal Pupuk Indonesia Group yang dilakukan bergantian setiap dua tahun sekali, untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap GCG. Pengelolaan Perusahaan yang baik diberbagai aspek berhasil memberikan skor *assessment* GCG Petrokimia Gresik yang baik setiap tahunnya. Di tahun 2019 mencapai 91,86, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 93,53, tahun 2021 mencapai 94,06 dan tahun 2022 kembali meningkat. Peningkatan skor ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah rekomendasi dari assessen. Untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki bobot penilaian paling besar. Implementasi GCG tahun 2022 lebih baik dari *assessment* sebelumnya, dimana rekomendasi pada tahun 2022 lebih sedikit dari *assessment* tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan jika implementasi GCG di Petrokimia Gresik sudah mendekati sempurna.



Pada bulan Februari 2025, posting Erick Thohir ( 'Erick Thohir's post) , 2025, menyatakan sebagai berikut: Terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) H Prabowo Subianto, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Danantara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Danantara.

Peluncuran Danantara hari ini menandai langkah penting kita sebagai bangsa untuk memastikan hilirisasi dan percepatan industrialisasi terus

berjalan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun.

Tentunya, kami akan bekerja sama dengan seluruh jajaran untuk memastikan Danantara beroperasi secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Allisa Luthfia, 2025 , menyajikan artitel berjudul *BPI Danantara resmi berdiri, berikut visi dan misinya*, sumber ANTARA, antara lain mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) adalah lembaga yang bertugas mengelola investasi pemerintah.

Badan ini dibentuk untuk mengonsolidasikan serta mengoptimalkan investasi negara dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara Indonesia memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi, serta mengelola dana investasi negara dengan prinsip tata kelola yang baik. Lembaga ini juga berperan dalam mengembangkan sektor-sektor strategis guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Visi dan Misi Danantara sbb :

Danantara memiliki visi untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui pengelolaan investasi berkelanjutan. Sebagai pengelola investasi terkemuka, dengan BUMN sebagai enabler dalam penempatan investasinya, Danantara berupaya membangun Sovereign Wealth Fund yang berdaya saing global.

Tujuannya adalah mendukung pembangunan nasional serta menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mencapai visi tersebut, Danantara menetapkan lima misi utama:

- 1. Mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan misi Asta Cita.**
2. Mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN strategis guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.
3. Menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di sektor-sektor strategis.
4. Menarik dan mengakselerasi investasi domestik maupun internasional untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
5. Membangun institusi Sovereign Wealth Fund yang mandiri dan unggul, dengan tata kelola keuangan yang sehat serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

BUMN di bawah naungan Danantara sbb :

Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN akan berada di bawah pengelolaan Danantara, yaitu:

1. Pertamina (PT Pertamina Persero)
2. PLN (PT Perusahaan Listrik Negara Persero)
3. BRI (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk)
4. BNI (PT Bank Negara Indonesia Tbk)
5. Mandiri (PT Bank Mandiri Tbk)
6. Telkom Indonesia (PT Telkom Indonesia Tbk)
7. MIND ID (Mining Industry Indonesia)

Dengan terbentuknya Danantara, diharapkan pengelolaan aset negara dapat lebih terarah, transparan, dan profesional, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Selain itu, kehadiran Danantara juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan kekayaan negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM DI INGGRIS**

Oliver Rawkins dan Natalie Hendy, 2024, menyajikan artikel berjudul *Penyederhanaan penegakan hukum: Inggris meratifikasi Konvensi Penegakan Hukum Den Haag 2019*, sumber Perusahaan Reed Smith, antara lain mengungkapkan bahwa

- Pada tanggal 27 Juni 2024 pemerintah Inggris meratifikasi Konvensi Den Haag tanggal 2 Juli 2019 tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Asing dalam Masalah Perdata atau Komersial.
- Konvensi ini menyediakan kerangka kerja yang seragam untuk pengakuan dan penegakan putusan antara Inggris dan negara-negara peserta lainnya, termasuk Uni Eropa.
- Peraturan ini akan mulai berlaku di Inggris pada tanggal 1 Juli 2025 dan berlaku untuk putusan yang diperoleh dalam proses hukum yang dimulai setelah tanggal tersebut.
- Konvensi ini akan mulai berlaku di Inggris pada tanggal 1 Juli 2025 dan berlaku untuk putusan yang diperoleh dalam proses hukum yang dimulai setelah tanggal tersebut.
- Konvensi ini menyediakan kerangka kerja yang seragam untuk pengakuan dan penegakan putusan antara Inggris dan negara-negara peserta lainnya.
- Negara-negara peserta lainnya termasuk semua negara anggota UE (kecuali Denmark) dan Ukraina, tempat Konvensi mulai berlaku pada 1 September 2023, dan Uruguay, tempat Konvensi akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024. Sejumlah negara lain telah



menandatangani Konvensi tetapi belum meratifikasinya, termasuk Kosta Rika, Israel, Montenegro, Makedonia Utara, Rusia, dan Amerika Serikat.

Prinsip penegakan hukum adalah mengandalkan kepolisian negara tersebut. Sumber Wikipedia mengunggah artikel berjudul *Penegakan hukum di Inggris Raya*, antara lain mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Britania Raya diselenggarakan secara terpisah di masing-masing sistem hukum Britania Raya: Inggris dan Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. <sup>[nb 1]</sup> *Sebagian besar tugas penegakan hukum dilakukan oleh polisi dari kepolisian teritorial.* Polisi Transportasi Inggris bertanggung jawab untuk mengawasi jaringan kereta api Inggris Raya, serta sistem angkutan cepat dan

trem tertentu.

Pada tahun 2021, terdapat 39 kepolisian teritorial di Inggris, 4 di Wales, satu di Skotlandia, dan satu di Irlandia Utara. <sup>[1]</sup> Masing-masing bertanggung jawab atas sebagian besar penegakan hukum dan pengurangan kejahatan di wilayah kepolisiannya. <sup>[nb 2]</sup> **Dalam hal pemerintahan nasional, kepolisian teritorial Inggris dan Wales diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri, meskipun secara operasional mereka independen dari pemerintah.** Polisi Transportasi Inggris (BTP), Polisi Kementerian Pertahanan (MDP), dan Polisi Nuklir Sipil (CNC) menyediakan layanan kepolisian spesialis di Inggris, Skotlandia, dan Wales.

*Badan Kejahatan Nasional (NCA) terutama bertugas menangani kejahatan terorganisasi dan telah dibandingkan dengan Biro Investigasi Federal (FBI) di Amerika Serikat.* <sup>[2][3]</sup>



Polisi memiliki kewenangan tertentu yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas mereka. ***Tugas utama mereka adalah melindungi nyawa dan harta benda, menjaga perdamaian, dan mencegah serta mendeteksi tindak pidana.***

Dalam model kepolisian Inggris, polisi menjalankan kewenangan mereka *dengan persetujuan implisit dari masyarakat*. "Polisi berdasarkan persetujuan" adalah frasa yang digunakan untuk menggambarkan hal ini. *Frasa ini menyatakan bahwa legitimasi kepolisian di mata masyarakat didasarkan pada konsensus umum yang mendukung transparansi tentang kewenangan mereka, integritas mereka dalam menjalankan kewenangan tersebut, dan akuntabilitas mereka dalam melakukannya.* <sup>[5][6]</sup>

**Sebagian besar** polisi di Inggris, Skotlandia, dan Wales tidak membawa senjata api. Pada tahun 2022, terdapat 142.526 petugas polisi di Inggris dan Wales, 6.192 di antaranya memiliki izin kepemilikan senjata api. <sup>[7]</sup>

### **Manajemen anti Perbudakan Modern sbb :**

Artikel berjudul *Hukum perbudakan modern di Inggris*, sumber Pinsent Masons LLP, antara lain mengungkapkan bahwa perbudakan modern terjadi atau memengaruhi perdagangan di semua negara. Ini adalah kejahatan terorganisasi serius yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang besar. Kejahatan tersebut meliputi perbudakan, kerja paksa atau wajib, pekerja anak, dan perdagangan manusia. Meskipun sulit untuk menentukan skala masalah ini, penelitian oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan bahwa lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perbudakan modern.

Perusahaan perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk membantu mereka mengidentifikasi dan membasmi risiko perbudakan modern dalam rantai pasokan mereka. Melakukan hal ini tidak hanya akan memungkinkan mereka untuk menunjukkan budaya dan komitmen terhadap kepatuhan dan, khususnya, terhadap tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga menghindari kerusakan reputasi dari kegagalan mereka yang sebenarnya atau yang dianggap terjadi dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini juga akan membantu mereka mematuhi kewajiban hukum yang timbul – seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris.

### **Persyaratan hukum berdasarkan Undang-Undang Perbudakan Modern sbb :**

Dirancang untuk menyediakan alat untuk mengatasi perbudakan dan pelanggaran perdagangan manusia, meningkatkan dukungan bagi korban, dan memperkenalkan komisaris anti-perbudakan independen, Undang-Undang Perbudakan Modern (Undang-Undang 2015) mulai berlaku pada bulan Oktober 2015.

Yang paling penting bagi bisnis adalah persyaratan bagian 54, yang mengharuskan organisasi komersial dalam lingkup tersebut untuk menyiapkan pernyataan perbudakan dan perdagangan manusia setiap tahun keuangan.

Siapa saja yang termasuk dalam cakupan persyaratan tersebut?

Persyaratan untuk membuat laporan tahunan tentang perbudakan dan perdagangan manusia berlaku untuk semua "organisasi komersial" yang memiliki total omzet, atau total omzet grup – yaitu total omzet perusahaan dan anak perusahaannya – tidak kurang dari £36 juta; yang

memasok barang atau jasa; dan yang menjalankan bisnis mereka, atau sebagian darinya, di bagian mana pun di Inggris Raya.

"Organisasi komersial" didefinisikan sebagai perusahaan, di mana pun didirikan, atau kemitraan, di mana pun dibentuk, yang menjalankan bisnis, atau bagian dari bisnis, di bagian mana pun di Inggris Raya. Undang-Undang 2015 juga menjelaskan bahwa "bisnis" mencakup perdagangan atau profesi.

### **Penegakan hukum anti-perbudakan sbb :**

Artikel 2024 berjudul *Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris: Masa Depan Transparansi dalam Rantai Pasokan*, sumber *Publikasi Skadden* , Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP dan Afiliasi , antara lain mengungkapkan bahwa ketika Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris 2015 (UU) mulai berlaku, undang-undang tersebut dianggap sebagai tonggak perkembangan hukum secara global. Inggris adalah salah satu yurisdiksi pertama yang memperkenalkan persyaratan hukum mengenai transparansi dalam rantai pasokan dan harapannya adalah undang-undang tersebut akan menjadi ajakan bagi para pelaku bisnis Inggris untuk mengidentifikasi dan memberantas perbudakan modern.

Namun, dalam hampir satu dekade yang telah berlalu sejak diperkenalkan, Undang-Undang tersebut dapat dikatakan memiliki dampak yang lebih kecil dari yang diharapkan, dan tren di yurisdiksi lain telah memperluas dan meningkatkan persyaratan serupa. Hal ini telah menyebabkan seruan untuk reformasi dari para aktivis dan anggota parlemen di Inggris. Pemerintah saat itu mengamanatkan tinjauan independen terhadap Undang-Undang tersebut, yang temuannya dipublikasikan pada tahun 2019 . Pemerintah menanggapi secara terperinci , diikuti oleh konsultasi publik yang ditanggapi oleh pemerintah . Belum ada perubahan legislatif yang dibuat meskipun banyak dukungan untuk reformasi.

Baru-baru ini, sebuah komite House of Lords dibentuk pada bulan Januari 2024 untuk mempertimbangkan potensi amandemen legislatif terhadap Undang-Undang tersebut. Pekerjaannya mungkin akan memicu perdebatan lebih lanjut tentang reformasi rezim transparansi rantai pasokan dalam Undang-Undang tersebut.

Pasal 54 Undang-Undang tersebut memberlakukan kewajiban kepada perusahaan yang memasok barang atau jasa yang memiliki total omzet sedikitnya £36 juta (dihitung sendiri atau termasuk anak perusahaannya) untuk menyiapkan **laporan perbudakan dan perdagangan manusia setiap tahun anggaran**. Perusahaan yang termasuk dalam cakupan tersebut mencakup perusahaan mana pun (di mana pun didirikan) yang menjalankan bisnis, atau bagian dari bisnis, di bagian mana pun di Inggris Raya di muka-bumi.

### **STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM NEGARA FEDERASI JERMAN**

Jerman terpilih penulis sebagai studi kasus kedua karena negara tersebut masih di liputi mendung era pemerintahan diktator dalam memasuki era-demokrasi dan transparansi. Artikel berjudul *Penegakan hukum di Jerman, 2008*, sumber Konten tersedia di bawah CC BY-SA 4.0 kecuali dinyatakan lain , antara lain mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Jerman **secara konstitusional sepenuhnya berada di tangan negara bagian, yang merupakan salah satu fitur utama sistem politik Jerman**.

Kepolisian selalu menjadi tanggung jawab negara-negara Jerman bahkan setelah tahun 1871 ketika negara itu bersatu . Konstitusi Republik Weimar tahun 1919 memang memberikan kemungkinan untuk menciptakan kepolisian nasional, jika diperlukan, tetapi baru pada era Nazi Gestapo (Polisi Rahasia Negara) disatukan di bawah kendali pusat dan kepolisian nasional dibentuk ( Kantor Utama Keamanan Reich — *Reichssicherheitshauptamt* , atau RSHA). Polisi menjadi alat negara terpusat dan partai Nazi . Menyusul kekalahan tahun 1945, Jerman terbagi; pada tahun 1949 tiga zona barat diubah menjadi Jerman Barat yang baru , sementara zona Soviet menjadi Jerman Timur . Setiap negara menempuh jalur yang berbeda terkait penegakan hukum .

Mengingat penyalahgunaan kekuasaan yang sangat besar oleh negara Nazi yang tersentralisasi, konstitusi Jerman Barat yang baru memberikan pemisahan kekuasaan yang ketat, **menempatkan penegakan hukum sepenuhnya di tangan negara bagian** .

Satu-satunya badan kepolisian yang diizinkan di tingkat federal (pemerintah pusat) adalah Penjaga Perbatasan Federal paramiliter (Jerman: *Bundesgrenzschutz* ), yang juga bertanggung jawab atas layanan penjaga pantai , dan Polisi Kriminal Federal , keduanya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri Federal ( pemerintah pusat).



Jerman Timur menciptakan pasukan polisi terpusat di bawah Kementerian Dalam Negeri, Volkspolizei paramiliter (secara harfiah berarti "Polisi Rakyat").

Mereka juga membentuk pasukan polisi perbatasan (Jerman: *Grenztruppen der DDR* ), yang awalnya merupakan pasukan independen, kemudian diintegrasikan ke dalam tentara dan kemudian direorganisasi sebagai organisasi militer independen. Karena perbatasan Jerman sebagian besar dibuka pada tahun 2005, karena perkembangan Uni Eropa dan penyebaran Perjanjian Schengen ke semua negara tetangga, *Bundesgrenzschutz* berganti nama

menjadi Polisi Federal (Jerman: *Bundespolizei* ).

Tugas Polisi Federal (pemerintah pusat) masih terbatas pada keamanan jalur kereta api , stasiun kereta api utama , bandara , pelabuhan laut, dan beberapa tugas khusus lainnya.

### **Penegakan hukum di bidang peradilan sbb :**

Artikel berjudul **Organisasi sistem peradilan** , adalah artikel tentang negara Republik Federal Jerman , sumber negara Republik Federal Jerman , antara lain mengungkapkan bahwa menurut Konstitusi Jerman, terdapat pengadilan di tingkat federal (pemerintah pusat) yaitu Mahkamah Konstitusi Federal dan lima pengadilan tinggi federal, yaitu:

1. Mahkamah Federal (Bundesgerichtshof)
2. Pengadilan Perburuhan Federal

(Bundesarbeitsgericht)

3. Pengadilan Sosial Federal (Bundessozialgericht)

4. Pengadilan Keuangan Federal (Bundesfinanzhof)

5. Pengadilan Administratif Federal

(Bundesverwaltungsgericht)

Semua pengadilan lain di Jerman adalah pengadilan negara federal dan berada dalam kompetensi “Negara” masing-masing.

### **Organisasi pengadilan dalam masalah pidana sbb :**

**PERTAMA** Pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

- a. pengadilan lokal (Amtsgerichte)
- b. pengadilan regional (Landgerichte)
- c. pengadilan regional yang lebih tinggi (Oberlandesgerichte)
- d. Mahkamah Federal (Bundesgerichtshof) di Karlsruhe.

*Pengadilan lokal, regional, dan pengadilan regional yang lebih tinggi semuanya merupakan pengadilan “Länder”. Hanya Pengadilan Federal yang merupakan pengadilan federasi.*

**Kompetensi berbagai tingkat pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada cabang pidana, ditetapkan dalam undang-undang**, Undang-Undang Konstitusi Pengadilan vide [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_gvg/](http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/).

Meskipun undang-undang ini juga memuat beberapa ketentuan prosedur umum, prosedur dalam masalah pidana secara keseluruhan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_stpo/](http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/).

**Pengadilan lokal** terletak di hampir setiap kota dan kota-kota besar. Pengadilan-pengadilan ini selalu bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama. Dalam masalah pidana, kewenangan pengadilan lokal terbatas pada pemberian denda atau hukuman kurungan kurang dari empat tahun.

**Pengadilan daerah :** Wilayah pengadilan daerah meliputi beberapa pengadilan lokal. Pengadilan daerah bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan kedua. Dalam masalah pidana, pengadilan daerah berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama dalam semua kasus yang hukuman kurungannya lebih dari 4 tahun. Dalam kasus tingkat kedua, pengadilan daerah berwenang dalam masalah pidana untuk mengajukan banding terhadap keputusan dan putusan pengadilan setempat.

**Pengadilan tinggi regional :** Distrik pengadilan tinggi regional meliputi beberapa pengadilan regional dan pengadilan lokal. Pengadilan tinggi regional bertindak terutama

sebagai pengadilan banding ketika banding diajukan terhadap putusan pengadilan regional yang bertindak sebagai pengadilan tingkat kedua; atau pengadilan lokal sebagai pengadilan tingkat pertama. Selain fungsi banding ini, pengadilan bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama untuk jenis pelanggaran tertentu, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap negara, dan terorisme.

**Pengadilan Federal di Karlsruhe :** Pengadilan ini merupakan pengadilan banding terakhir untuk semua putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan regional dan pengadilan tinggi regional di Jerman yang bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Federal tidak pernah bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan karena itu tidak memiliki yurisdiksi asli.

**KEDUA.** Hukum Jerman mengatur dua jenis banding:

Yang pertama disebut “ Berufung ”. Ini adalah upaya hukum banding atas pertanyaan fakta dan hukum. Upaya hukum ini menyediakan pemeriksaan menyeluruh atas kasus tersebut (trial de novo).

Upaya hukum lainnya disebut “ Revisi ”. Ini adalah upaya hukum banding hanya pada masalah hukum. Pengadilan banding hanya memeriksa apakah hukum substantif telah diterapkan dengan benar dan apakah aturan prosedural fundamental telah dipatuhi. Pengadilan banding tidak akan menilai ulang bukti sebagai ganti pengadilan tingkat pertama tetapi hanya akan melakukan intervensi jika bukti tersebut telah terbukti keliru.

Semua putusan dalam perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan setempat dapat digugat dengan banding atas fakta dan hukum. Pengadilan daerahlah yang memutuskan banding tersebut. Terhadap putusan pengadilan daerah setelah banding atas fakta dan hukum, upaya hukum lebih lanjut dapat diajukan, yaitu banding atas hukum. Banding ini ditangani oleh pengadilan daerah yang lebih tinggi.

Dalam kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan daerah sebagai pengadilan tingkat pertama, banding atas fakta dan hukum tidak dapat diajukan. Dalam kasus-kasus ini, hanya banding atas

hukum yang dapat diajukan. Hal yang sama berlaku ketika pengadilan daerah yang lebih tinggi telah memutuskan suatu kasus sebagai pengadilan tingkat pertama seperti misalnya dalam kasus-kasus teroris.

Dalam kasus ini, hanya ada banding atas hukum tetapi tidak ada banding atas fakta dan hukum. Banding atas hukum terhadap putusan pengadilan daerah dan pengadilan daerah yang lebih tinggi semuanya ditangani oleh Pengadilan Federal di Karlsruhe.

**KETIGA.Kejaksaan dan kewenangannya sbb:**

Kantor kejaksaan dibentuk di setiap pengadilan daerah dan menjalankan fungsi penuntutan umum tidak hanya di pengadilan daerah tetapi juga di pengadilan lokal yang termasuk dalam distrik pengadilan daerah masing-masing.

Kantor kejaksaan berwenang untuk menyelidiki semua jenis tindak pidana kecuali tindak pidana terhadap negara dan tindak pidana lain yang termasuk dalam

kompetensi Kantor Kejaksaan Umum Federal. Selain itu, mereka juga mengajukan kasus yang mereka bawa ke pengadilan pidana, dan mereka juga berwenang untuk mengeksekusi hukuman.

Sebagai aturan, di Jerman berlaku asas penuntutan wajib (*Legalitätsprinzip*). *Jika suatu tindakan investigasi memerlukan keputusan hakim (terutama untuk tindakan pemaksaan seperti penggeledahan rumah, penyitaan, penyadapan telepon, penahanan praperadilan, dll.), jaksa penuntut umum yang berwenang mengajukan mosi ke pengadilan setempat yang berwenang. Hakim pemeriksa (Ermittlungsrichter) kemudian memutuskan apakah akan mengabulkan mosi tersebut. Di bawah prasyarat tertentu, kantor kejaksaan umum dapat memerintahkan sendiri tindakan pemaksaan dalam keadaan mendesak, misalnya bahaya yang mengancam.*

Kantor kejaksaan umum berada di bawah kantor Jaksa Agung Umum yang berkedudukan di setiap Pengadilan Tinggi Daerah. Setiap Negara Bagian memiliki setidaknya satu Pengadilan Tinggi Daerah dan karenanya satu Kantor Kejaksaan Umum, beberapa memiliki dua (misalnya Baden-Württemberg dan Rhineland-Palatinate) atau tiga (Bavaria, Niedersachsen, Rhine-Westfalen Utara).

**Di tingkat federal hanya ada satu kantor kejaksaan,** Kantor Kejaksaan Umum Federal yang berkedudukan di Karlsruhe. Di bidang investigasi dan penuntutan kejahatan, Kantor Kejaksaan Umum Federal berwenang untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan terhadap negara dan kejahatan teroris serta kasus-kasus lain, jika melibatkan kejahatan serius yang melampaui batas-batas masing-masing Negara Bagian. Lebih jauh, kantor ini terlibat dalam semua banding atas pertanyaan hukum yang diajukan terhadap putusan semua pengadilan regional dan pengadilan regional yang lebih tinggi di Jerman saat bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama. Tidak ada hubungan atasan/bawahan dalam bentuk apa pun antara Kantor Kejaksaan Umum Federal di Karlsruhe dan kantor-kantor penuntutan Negara Bagian.

### **Gambaran umum sistem nasional kerja sama peradilan internasional dalam masalah pidana sbb :**

#### **I. Permintaan masuk dari Negara Anggota UE lainnya**

Otoritas peradilan yang berwenang untuk menerima dan menangani permintaan bantuan hukum timbal balik yang masuk adalah Kantor Kejaksaan Umum yang berwenang di daerah setempat. Hal ini berlaku untuk semua jenis permintaan bantuan hukum timbal balik, dengan beberapa pengecualian, terutama

- a. Permintaan yang terkait dengan penegakan sanksi keuangan berdasarkan Keputusan Kerangka Kerja UE 2005/212/JHA dan pada entri dalam Daftar Pidana Pusat Federal (misalnya putusan pidana), yang keduanya ditangani oleh Kantor Kehakiman Federal dan karenanya harus dikirim ke otoritas tersebut, dan
- b. Permintaan untuk menyerahkan seseorang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Eropa. Karena Pengadilan Tinggi Regional yang memutuskan permintaan ekstradisi termasuk permintaan mengenai penyerahan seseorang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Eropa, Surat Perintah Penangkapan Eropa harus dikirim dan akan ditangani oleh Kantor Kejaksaan Umum.



Menggunakan Atlas EJN yang tersedia di situs web akan memudahkan untuk menemukan Kantor Kejaksaan Umum atau pengadilan yang kompeten. Selain itu, “Direktori Tempat dan Pengadilan” nasional yang dikelola oleh Kementerian Kehakiman Rhine-Westfalen Utara mungkin berguna, jika Anda mengetahui kode area atau kotamadya:

<https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche>

Kantor Kehakiman Federal juga dapat membantu menentukan otoritas yang kompeten secara lokal, tetapi tidak menangani permintaan di dalam Uni Eropa. Otoritas peradilan “Länder” dapat melaporkan kasus ke Kantor Kehakiman Federal karena signifikansinya atau untuk memastikan keseragaman praktik dalam ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

## **II. Permintaan keluar ke Negara Anggota UE lainnya**

Sebagai aturan, kantor kejaksaan dan pengadilan berwenang untuk mengeluarkan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam kasus yang mereka tangani. Kantor kejaksaan juga berwenang untuk mengeluarkan Perintah Penangkapan Eropa setelah surat perintah penangkapan nasional. Pengecualian berlaku untuk permintaan yang terkait dengan penegakan sanksi keuangan berdasarkan Keputusan Kerangka UE (lihat di atas) di mana Kantor Kehakiman Federal adalah otoritas pusat yang berwenang tidak hanya untuk permintaan yang masuk tetapi juga untuk permintaan yang keluar.

## **III. Catatan tambahan**

Jerman telah mendirikan satu titik kontak EJN per negara bagian federal yang berlokasi di Kantor Kejaksaan Umum di masing-masing “Negara”.

Lebih jauh, titik kontak EJN juga didirikan di Kantor Kejaksaan Umum Federal dan di Kantor Kehakiman Federal.

Dengan demikian, total ada 18 titik kontak EJN di Jerman.

Undang-undang Jerman yang mengatur ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik lainnya ke dan dari Negara lain adalah Undang-undang tentang kerja sama internasional dalam masalah pidana (IRG – Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), lihat [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_irg/index.html](http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_irg/index.html)

Untuk memastikan keseragaman dan membantu praktisi, Pemerintah Federal dan pemerintah “Länder” telah mengeluarkan “*pedoman resmi untuk kerja sama internasional dalam masalah kriminal*” (RiVAST – Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in Strafrechtlichen Angelegenheiten). Dokumen-dokumen tersebut tersedia (dalam bahasa Jerman) di situs web Kementerian Kehakiman Federal

## **Penegakan Hukum Pasar Modal Jerman sbb :**

Artikel karangan Eike Bertengkar , Marcus Reischl , Christoph Skoupil dan Kristen Hissnauer , 2023, berjudul *Jerman: Masalah Penegakan Hukum yang Mendesak yang Mempengaruhi Perusahaan Terdaftar dan Perantara Pasar Efek*, 2023, sumber Insight,

diterbitkan bersama GIR, Law Business Research , antara lain menyatakan bahwa Emiten PM atau penerbit, serta pelaku pasar sekuritas Jerman lainnya, tunduk pada persyaratan yang diberlakukan oleh undang-undang sekuritas Uni Eropa dan Jerman. Kepatuhan terhadap persyaratan ini diawasi oleh Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman (BaFin). Sehubungan dengan kemungkinan sanksi terhadap perusahaan tercatat dan perantara pasar, khususnya denda terkait penjualan dan perintah penyitaan, penting bagi entitas tersebut untuk mematuhi persyaratan. Sejak aktivitas penipuan dan kebangkrutan Wirecard AG pada tahun 2020, *Undang-Undang Penguatan Integritas Pasar Keuangan (FISG)* diperkenalkan untuk meningkatkan integritas pasar keuangan Jerman dengan memperluas, khususnya, kewenangan pengawasan BaFin.

Makalah memberikan gambaran singkat mengenai isu-isu terpenting yang memengaruhi perusahaan tercatat dan perantara pasar sekuritas sehubungan dengan penegakan hukum sekuritas di Jerman.

Apa saja peraturan perundang-undangan yang relevan?

Pasar sekuritas Jerman diatur secara ketat dengan sejumlah undang-undang yang relevan. Undang-undang yang paling penting adalah sebagai berikut.

- Undang-Undang Perdagangan Efek Jerman (WpHG): Undang-Undang ini menetapkan peraturan utama yang mengatur perdagangan nasional dan internasional dalam berbagai sekuritas. WpHG memberlakukan kewajiban pada penerbit instrumen keuangan dan perantara pasar. Pada saat yang sama, BaFin memiliki kewenangan luas untuk menegakkan WpHG. Undang-Undang ini menetapkan aturan khusus yang dirancang untuk melindungi investor dan menetapkan berbagai pelanggaran pidana dan peraturan.
- Peraturan (UE) No. 596/2014 (Peraturan Penyalahgunaan Pasar): Peraturan ini bertujuan untuk memerangi perdagangan orang dalam (*insider trading*) dan manipulasi pasar, bersama dengan Arahan 2014/57/UE (Arahan Penyalahgunaan Pasar), yang menetapkan sanksi pidana atas penyalahgunaan pasar, peraturan ini membentuk kerangka hukum Eropa terhadap penyalahgunaan pasar.

Tiga bidang pokok utama Peraturan Penyalahgunaan Pasar adalah

1. Larangan perdagangan orang dalam,
2. Pengungkapan informasi orang dalam yang tepat waktu oleh penerbit, dan
3. Pencegahan serta penanggulangan manipulasi pasar.

### **Penegakan hukum pidana sbb :**

Omer Faruk Madanoglu , 2024, menyajikan artikel berjudul *Penegakan hukum pidana Jerman menuai kritik karena menargetkan pendukung Palestina*, sumber Situs web Anadolu Agency, antara lain mengungkapkan bahwa mahasiswa pro-Palestina menggelar demonstrasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Humboldt di Berlin, Jerman pada 23 Mei 2024. Mahasiswa yang meneriakkan slogan-slogan mendukung Palestina dihentikan oleh polisi dan banyak demonstran ditahan. Penerapan hukum pidana Jerman terhadap pendukung Palestina telah diawasi dengan cermat, dengan tuduhan penegakan hukum yang tidak setara dan penekanan kebebasan berbicara. Yalcin Tekinoglu, seorang pengacara pidana yang mengkhususkan diri dalam kasus diskriminasi anti-Muslim di Jerman, telah menyuarakan

kekhawatirannya tentang penggunaan Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman oleh pemerintah. Pasal ini, yang membahas tentang hasutan untuk membenci dan penyangkalan genosida, digunakan dengan cara yang digambarkan Tekinoglu sebagai "senjata" untuk mengintimidasi dan membungkam para pendukung Palestina. Menurut Tekinoglu, meski Pasal 130 sudah ada sejak lama, penerapannya makin intensif sejak 7 Oktober. Ia mencatat bahwa bahkan unggahan media sosial yang mengkritik Israel kini ditafsirkan sebagai potensi kejahatan yang dapat memicu kebencian atau mengganggu perdamaian di Jerman.

Pengacara tersebut menyoroti "standar ganda" dalam penerapan hukum. Ia menunjukkan bahwa ketika Muslim atau non-Yahudi menghadapi diskriminasi atau penghinaan, pengadilan sering kali enggan menerapkan Pasal 130. Ia juga mencatat kasus-kasus yang melibatkan dugaan anti-Semitisme kini ditangani oleh jaksa federal, yang berpotensi menyebabkan hukuman yang lebih berat, termasuk deportasi.

"Seorang pria yang ditangkap karena pembakaran masjid mungkin tidak dicap sebagai pelaku kejahatan anti-Muslim. Namun, menghadiri protes untuk mendukung Palestina dapat langsung mengakibatkan dakwaan berdasarkan Pasal 130 dan dicatat sebagai tindak pidana anti-Semit," kata pengacara tersebut.

Jerman menjadi tuan rumah salah satu komunitas Palestina terbesar di Eropa, yang menurut Tekinoglu merupakan faktor dalam penerapan hukum yang lebih ketat. Ia melaporkan banyak kasus polisi Jerman menerapkan Pasal 130 tanpa pembenaran yang tepat, yang memengaruhi banyak individu dalam komunitas Muslim.

Tekinoglu mengemukakan kekhawatirannya tentang hak untuk melakukan protes dan kebebasan berekspresi di Jerman, dengan menyebutkan kasus-kasus di mana individu yang membagikan kartun yang menggambarkan tindakan Israel di Gaza telah menerima pemberitahuan hukum, yang berpotensi memengaruhi status kependudukan atau pendidikan mereka, menyatakan bahwa sikap bias Jerman merusak persepsinya terhadap supremasi hukum, Tekinoglu berkata: "Sayangnya, terdapat banyak sekali diskriminasi di Jerman. Di sekolah, tempat kerja, dan ruang publik, diskriminasi dilakukan terhadap Muslim, warga negara asing, dan bahkan warga negara generasi keempat yang lahir di Jerman."

Pengacara tersebut menekankan perlunya perlakuan yang sama di bawah hukum, terlepas dari kecenderungan politik atau ideologis. Ia mengatakan meskipun politisi boleh mengekspresikan pandangan ideologis, hakim, jaksa, dan guru harus tetap bersikap netral. Ia menyerukan pendekatan yang seimbang yang menghormati hak konstitusional atas kebebasan berekspresi bagi semua kelompok.

*Pasal 130 menetapkan hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda bagi mereka yang memicu kebencian dan kekerasan dengan cara yang mengganggu kedamaian publik, yang melakukan tindakan merendahkan dan mempermalukan kelompok atau individu tertentu, dan yang menyangkal kejahatan yang dilakukan di bawah kekuasaan Nazi.*

### **Penegakan hukum anti-korupsi sbb :**

Artikel berjudul *Undang-Undang dan Peraturan Anti Suap dan Korupsi 2025 – Jerman*, sumber Global Legal Group, mengulas bebgai hal sebagai berikut.

- Dari sekitar 200 negara-negara di muka-bumi, Jerman berada di peringkat kesembilan dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2023 (edisi terbaru). Dengan 78 poin dari kemungkinan 100, peringkat keseluruhan Jerman telah menurun satu poin sejak tahun sebelumnya, sementara pada saat yang sama tetap berada di posisi kesembilan di antara semua negara.
- Menurut *Transparency International Jerman*, penurunan poin dapat dikaitkan dengan berbagai skandal korupsi pada tahun lalu, seperti tuduhan seputar pembelian masker medis terkait dengan krisis COVID-19 (lihat di bawah), apa yang disebut skandal "Cum-Ex" (meskipun topik ini menyangkut potensi penggelapan pajak, Transparency International telah menggolongkan "Cum-Ex" pada tahun 2019 sebagai bentuk korupsi dalam arti yang lebih luas), tuduhan mengenai politisi Jerman telah menerima uang dan hadiah dari sumber-sumber Azerbaijan, atau apa yang disebut **skandal "Graichen", di mana seorang menteri federal diduga mencoba menempatkan seorang teman dekat sebagai kepala Badan Energi Jerman tanpa mengungkapkan konflik kepentingan.**
- Diperkirakan karena proses hukum yang ekstensif di beberapa negara bagian federal, kasus korupsi yang tercatat di Jerman meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Laporan Situasi Korupsi Federal 2023 ( *Korruption Bundeslagebild 2023* ), jumlah tersangka yang diselidiki atas tindak pidana korupsi juga meningkat.



- Secara umum, hukum Jerman memiliki kerangka kerja antikorupsi yang kuat. Memberi, menawarkan, atau menjanjikan, serta menerima, menuntut, atau menerima janji suap semuanya merupakan tindak pidana. Pembayaran fasilitasi juga dilarang. **Bahkan hadiah dan keramah-tamahan bernilai kecil untuk pejabat publik dapat merupakan tindak pidana tergantung pada keadaan khusus kasus tersebut, nilai manfaat, dan niat pemberi.**

## KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sampel studi kasus negara terpilih sebagai studi-banding berpotensi-percontohan, berdasar pilihan pribadi penulis (non-random & judgemental sampling) ; Inggris terpilih karena sejarah Magna Carta 1215, Jerman dipilih karena pembangunan citra-demokratis yang masih dibayangi stigma pemerintahan diktator.

Penegakan hukum suatu bangsa meliputi semua aspek legislatif, eksekutif dan legislatif negara tersebut. Aspek eksekutif adalah tentang pengaturan birokrasi lembaga kepolisian yang ber GCG. Kepastian pemberlakuan hukum positif dan kualitas pengadilan adalah segala-galanya.

Mari mendukung program kabinet NKRI.